



**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN SOLOK**

RENCANA KERJA 2026



dppkabsolok@gmail.com



dppkabsolok



dppkabsolok



Jl. Raya Koto Baru No.63, Solok

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya pula, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2026 dapat diselesaikan. Substansi Renja Dinas Perikanan dan Pangan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan. Dimana dalam Renstra tersebut dimuat, Strategi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2025 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan penyusunan Renja adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan dan pangan Kabupaten Solok selama satu tahun ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dapat menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah.

Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pangan adalah mengajak semua pemangku

kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Solok.

Koto Baru, , September 2025
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Solok

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Solok government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK" and "DINAS PERIKANAN DAN PANGAN". In the center of the stamp is the official emblem of Kabupaten Solok. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Ir. SYOUFITRI, M.M
NIP. 19701115 200502 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	31
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	53
BAB V PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

2.1 Indikator Pengukur Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Yang Berdaya Saing	6
2.2 Perkembangan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Solok Tahun 2022-2024	7
2.3 Pertumbuhan Produksi Perikanan Tahun 2022-2024	7
2.4 Produksi Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2022-2024	8
2.5 Produksi Perikanan Perairan Umum atau Tangkap Kabupaten Solok Tahun 2022-2024	8
2.6 Produksi Budidaya Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2022-2024 Berdasarkan Lokasi Usaha	8
2.7 Produksi Budidaya Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2022-2024 Berdasarkan Komoditi	9
2.8 Indikator Pengukuran Sasaran Meningkatnya Pengolahan, Pemasaran dan Konsumsi Ikan	10
2.9 Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2022-2024	10
3.1 Indikator Pengukuran Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan	11
4.1 Indikator Pengukur Sasaran Terkendalinya Harga Pangan Utama di Pasaran	13
4.2 Coefisien Variasi (CV) Per Komoditi Pangan Strategis Ditingkat Konsumen dan Produsen Tahun 2024	13
5.1 Indikator Pengukur Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Segar	15
5.2 Perkembangan Ketersediaan Bahan Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi Masyarakat Tahun 2022-2024	16
6.1 Indikator Pengukur Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat	17
7.1 Indikator Pengukur Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	18
7.2 Skala Pengukuran	19

BAB I

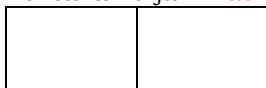
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta pendanaannya. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 16 dan pasal 126 bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang akan dijadikan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, penyusunan awal rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didasari dari dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang kemudian akan dituangkan draf rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah. Draft rancangan Renja Perangkat Daerah inilah yang akan dibawa pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musrenbang RKPD serta mengakomodir hasil dari Musrenbang tersebut. Hasil perumusan akhir rancangan RKPD akan ditetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Bupati dan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Dokumen Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, dimana arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok dituangkan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dan dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Dengan demikian penyusunan Renja ditujukan untuk



menjawab sasaran dan tujuan RPJMD dan Renstra melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dijabarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dan hubungannya dengan Renja Kementerian/Lembaga terkait dan Renja propinsi dengan adanya sinergitas antara ketiga dokumen perencanaan kerja (Renja) tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2026 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

--	--

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pembangunan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2023 tentang Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan dan Pangan

--	--

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2026 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan terkini serta penyesuaian rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2026 yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja propinsi/kabupaten/kota.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

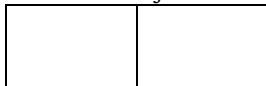
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

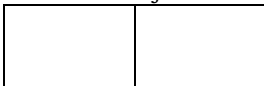
3.3 Program dan Kegiatan

Memuat program dan kegiatan yang direncanakan tahun itu

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Capaian kinerja di bidang perikanan dan ketahanan pangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN 1 : MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN YANG BERDAYA SAING

Produksi perikanan merupakan semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi ikan Kabupaten Solok diperoleh dari produksi perikanan perairan umum/tangkap (sungai, danau, telaga, rawa) dan dari perikanan budidaya di kolam, sawah, saluran irigasi, karamba jaring apung, kolam air deras dan karamba.

Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan dapat diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.1 : Indikator Pengukur Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan yang Berdaya Saing

N o	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
1	Persentase peningkatan produksi perikanan	(35,81)%	8,23%	8,82%	107,17%

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 capaian kinerja persentase peningkatan produksi perikanan sangat baik dengan target kinerja 8,23% dan realisasi 8,82%. Pencapaian ini termasuk kategori **Sangat Baik**.

--	--

Perkembangan capaian target peningkatan produksi perikanan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 : Perkembangan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Solok Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Capaian			Target Thn 2026	% Capaian Renstra
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	12	13	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase peningkatan produksi perikanan	7,54	7,91	8,23	18,89	10,17	8,82	250,13	128,57	107,17	8,61	102,44

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan produksi perikanan pada tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana laju pertumbuhan produksi perikanan berikut:

Tabel 2.3 : Pertumbuhan Produksi Perikanan Tahun 2022-2024

No	Uraian	Pertumbuhan Produksi (%)		
		2022	2023	2024
1	Produksi perikanan budidaya	60,06	9,56	9,86
2	Pertumbuhan produksi perikanan perairan umum	49,26	13,51	9,83
3	Total pertumbuhan produksi perikanan Kab. Solok	18,19	10,17	8,82

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

Dibandingkan dari tahun sebelumnya capaian kinerja peningkatan produksi perikanan mengalami penurunan sebesar 8,82% disbanding tahun 2023 sebesar 10,17%. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah produksi perikanan di perairan umum karena factor cuaca yang ekstrem.

Jika dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa peningkatan produksi perikanan disebabkan oleh kenaikan produksi perikanan budidaya sebesar 9,86% namun produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 9,83% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 13,51%. Persentase peningkatan produksi perikanan dengan target akhir periode yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan strategis (Renstra) yakni persentase peningkatan produksi perikanan sebesar 8,61% sudah melebihi target sampai akhir periode Renstra dengan capaian renstra tahun 2024 sebesar 8,82%.

Produksi perikanan tahun 2022-2024 baik produksi budidaya maupun produksi perairan umum dapat dilihat pada berikut :

--	--

Tabel 2.4 : Produksi Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2022 – 2024

No	Uraian	Realisasi (ton)		
		2022	2023	2024
1	Produksi perikanan budidaya	4.483,54	4.912,25	5.321,46
2	Produksi perikanan perairan umum	823,10	934,28	1.044,87
	Jumlah	5.306,64	5.846,53	6.366,33

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

Produksi perikanan perairan umum/tangkap tahun 2022-2024 berdasarkan jenis perairan umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 : Produksi Perikanan Perikanan Perairan Umum/Tangkap Tahun 2022 – 2024

No	Uraian	Produksi (ton)		
		2022	2023	2024
1	Danau	570,34	667,20	752,65
2	Sungai	198,80	210,70	227,61
3	Rawa	11,58	13,70	18,32
4	Genangan Air Lainnya	42,38	42,68	46,29
	Total	823,10	934,28	1.044,87

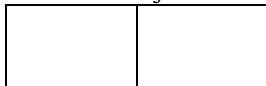
Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

Capaian kinerja peningkatan produksi perikanan perairan umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 8,33%. Sedangkan data produksi perikanan budidaya dari tahun 2022-2024 berdasarkan lokasi pembesarannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6 : Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2022 – 2024 Berdasarkan Lokasi Usaha

No	Budidaya	Produksi (ton)		
		2022	2023	2024
1	Sawah	234,06	256,56	279,14
2	Kolam	2466,96	2698,99	2.917,05
3	Saluran irigasi	242,01	266,14	289,66
4	Kolam Air Deras	779,21	854,87	928,37
5	Karamba Jaring Apung	760,71	835,05	906,97
6	Karamba	0,59	0,64	0,27
	Total	4.483,54	2.912,25	5.321,46

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024



Capaian kinerja peningkatan produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 8,82%. Produksi perikanan budidaya menurut jenis ikan dan lokasi pembesarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7 : Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2022– 2024 berdasarkan Komoditi

No	Jenis Ikan	Produksi						Jumlah
		Kolam	Sawah	KJA	KAD	SI	Karamba	
1	Mas	423,43	131,85	250,24	359,78	103,02	0,08	1.268,39
2	Nila	1.519,20	147,29	656,73	568,59	186,63	0,62	3.079,07
3	Lele	966,42	-	-	-	-	-	966,42
4	Gurami	4,39	-	-	-	-	-	4,39
5	Patin	3,54	-	-	-	-	-	3,54
	2024	2.916,98	279,14	906,97	928,37	389,66	0,70	5.321,46
	2023	2.698,99	256,56	835,05	854,88	266,14	0,64	4.912,25
	2022	2.442,34	231,72	755,44	773,53	240,28	0,58	4.443,88

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

Walaupun target kinerja produksi perikanan pada tahun 2024 sudah memenuhi target namun masih ditemukannya beberapa kendala dan permasalahan terutama pada produksi budidaya perikanan yang disebabkan oleh berbagai faktor yakni:

1. Mahalnya biaya produksi terutama biaya pakan pabrikan sementara harga jual ikan tidak mengalami peningkatan
2. Rata-rata induk pada Unit Pemenuhan Rakyat (UPR) sudah tidak layak pakai (tidak produktif) yang mengakibatkan produksi benih rendah dan pertumbuhan yang lambat
3. Sudah rendahnya tingkat produksi karamba yang memproduksi di Kabupaten Solok akibat kesulitan dalam modal usaha dan karamba yang ada sudah tidak layak lagi dipakai
4. Tidak berfungsinya mesin pembuatan pakan yang ada pada kelompok karena kesulitan dalam memperoleh bahan baku
5. Belum adanya sistem plasma di sektor perikanan yang menopang permodalan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Solok

Sedangkan pada perairan umum, produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 9,83 % hal ini disebabkan berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi di lapangan. Untuk peningkatan produksi perairan umum yang menjadi salah satu kendalanya adalah berkembangnya alat tangkap bagan yang tidak ramah lingkungan serta perubahan cuaca ekstrem.



SASARAN 2 : MENINGKATNYA PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN KONSUMSI IKAN

Sasaran Meningkatnya pengolahan, pemasaran dan konsumsi ikan diukur dari Angka Konsumsi Ikan. Angka Konsumsi Ikan adalah tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita. Capaian Indikator Kinerja Utama sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 : Indikator Pengukur Sasaran Meningkatnya Pengolahan, Pemasaran dan Konsumsi Ikan

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
1	Angka Konsumsi Ikan	36,05 kg/kap	40,1 kg/kap	42,39 kg/kap	105,71%

Sumber : Data Susenas

Angka Konsumsi Ikan dihitung dari Konsumsi ikan di dalam rumah tangga (data Susenas) 22,94 kg/kap ditambah dengan Konsumsi ikan diluar rumah tangga 15,60 kg/kap ditambah dengan Konsumsi ikan tidak tercatat 3,85 kg/kap.

Perkembangan capaian target kinerja Angka Konsumsi Ikan beberapa tahun terakhir dapat digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 2.9 : Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Capaian			Target Thn 2026	% Capaian Renstra
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap)	38,10	39,15	40,1	41,39	41,89	42,39	108,61	110,27	105,71	42	100,93

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka konsumsi ikan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Laju pertumbuhan angka konsumsi ikan pada tahun 2023 sebesar sebesar 110,27% dan pada tahun 2024 sebesar 105,71%

Jika dibandingkan dengan target akhir periode yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan strategis (Renstra) yakni 42 kg/kap, sudah mencapai angka yang di targetkan, yaitu 42 kg/kap.

Tercapainya sasaran kinerja meningkatnya pengolahan, pemasaran dan konsumsi ikan disebabkan oleh :

1. Semakin beragamnya olahan hasil perikanan dan dipasarkan dengan harga yang terjangkau

--	--

2. Semakin meningkatnya usaha pengolahan perikanan di masyarakat
3. Semakin meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan dengan adanya program Gerakan Gemar Makan Ikan sampai ke tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Meningkatnya jumlah rumah makan yang menyediakan dengan menu ikan

SASARAN 3 : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Sasaran kinerja Meningkatnya ketersediaan pangan dapat diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.1 : Indikator Pengukur Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
1	Jumlah ketersediaan pangan utama perkapita	594,47 kg/kap/thn	645,2 kg/kap/thn	444,48 kg/kap/thn	68,89%

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

Ketersediaan dapat diukur dengan formulasi jumlah rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun dibagi dengan jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil. Ketersediaan pangan utama perkapita pada tahun 2024 sebesar 444,48 kg/kap/tahun didapat dari rata-rata ketersediaan pangan utama 180.185.000 kg dan jumlah penduduk 405.380 jiwa. Penghitungan angka ketersediaan pangan diperoleh melalui aplikasi Neraca Bahan Makanan (NBM) yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 capaian kinerja terjaganya ketersediaan pangan adalah 68,89% dengan target kinerja 645,2 kg/kap/thn dan realisasi 444,48 kg/kap/thn. Pencapaian ini termasuk kategori **Cukup**. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti produksi pangan yang menurun dan telah banyaknya alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi pemukiman dan perladangan. Ditambah dengan faktor cuaca yang tidak menentu membuat hasil panen yang kurang dari harapan.

--	--

Ketersediaan pangan utama (beras) sebesar 180.185 ton, jika dikonversi ke ketersediaan pangan utama perkapita akan diperoleh sebesar 444,48 kg/kapita/tahun. Sedangkan kebutuhan pangan sebesar 42.152 kg/kapita/thn.

Ketersediaan pangan utama (beras) Kabupaten Solok diperoleh dari produksi daerah sendiri. Total ketersediaan beras tahun 2024 sebesar 180.185 ton, menurun sebesar 3.109 ton dari tahun 2023 yaitu ketersediaan sebesar 183.294 ton.

Ketersediaan pangan baik dari segi natura maupun dari segi nilai gizinya melebihi target yang telah ditetapkan/disarankan WNPG. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Solok aman dan tidak kekurangan dari segi ketersediaan bahan pangan utama yakni beras dan ketersediaan pangan lainnya, tetapi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok.

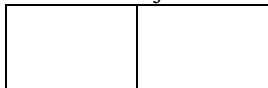
Tidak tercapainya target sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan di Kabupaten Solok disebabkan karena :

1. Produksi padi mengalami peningkatan namun tidak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Produksi padi tahun 2024 sebesar 315.155 ton sedangkan jumlah penduduk 405.380 jiwa
2. Perubahan budaya masyarakat dalam pencadangan pangan. Masyarakat langsung menjual gabah pada waktu panen tanpa adanya stok untuk rumah tangga
3. Berkurangnya luas lahan produktif akibat alih fungsi lahan sehingga berdampak pada ketersediaan pangan
4. Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah rawan bencana sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan

Walaupun terjadi penurunan ketersediaan pangan utama pada tahun 2024, tetapi Kabupaten Solok masih tetap surplus beras dibandingkan dengan kebutuhan. Kebutuhan beras tahun 2024 di Kabupaten Solok sebesar 38.449 ton, sementara ketersediaan beras sebesar 180.185 ton. Hal ini menunjukkan adanya surplus beras sebesar 141.736 ton.

SASARAN 4 : TERKENDALINYA HARGA DAN LANCARNYA AKSESIBILITAS PANGAN MASYARAKAT

Terkendalinya harga dan lancarnya aksesibilitas pangan masyarakat menunjukkan stabilnya harga pangan ditingkat konsumen dan produsen. Gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidak cukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah, yang mungkin disebabkan oleh rendahnya produksi dan gangguan pada proses distribusi yang disebabkan dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan OPT dan kurang baiknya sarana transportasi maupun akses transportasi.



Sasaran terkendalinya harga pangan utama dipasaran dapat diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.1 : Indikator Pengukur Sasaran Terkendalinya Harga Pangan Utama Dipasaran

nNo	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
1	Fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen (Coefisien Variasi)	5,87%	9,8%	10,12%	96,84%

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

Terkendalinya harga pangan utama dipasaran dapat diukur dari fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen yang dihitung dari jumlah rata-rata Coefisien Variasi (CV) ditingkat konsumen, Sedangkan penghitungan Coefisien Variasi (CV) dihitung dari jumlah harga komoditi pangan strategis dalam setahun dibagi dengan harga rata-rata dalam setahun. Dimana jumlah rata-rata Coefisien Variasi (CV) ditingkat konsumen dan produsen sebesar 10,12% yang diperoleh dari rata-rata angka Coefisien Variasi (CV) konsumen 8,8% dan angka Coefisien Variasi (CV) produsen 11,45%.

Perolehan angka Coefisien Variasi (CV) masing-masing komoditi ditingkat konsumsi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 : Coefisien Variasi (CV) Per Komodoti Pangan Strategis Ditingkat Konsumen dan Produsen Tahun 2024

No	Komoditi	Standar Deviasi Jumlah Rata-rata Harga komoditi pangan strategis		Rata-rata Harga Komodoti Strategis Dalam Satu Tahun		CV		Ket
		Konsumen	Produsen	Konsumen	Produsen	Konsumen	Produsen	
1	Beras Premium	399	584	16.942	14.358	2.36	4.07	
2	Beras Medium	729	427	15.008	12.919	4.86	3.31	
3	Beras Termurah	842	798	11.782	9.815	7.14	8.13	
4	Gula Pasir Lokal	780	703	17.364	14.449	4.49	4.87	
5	Bawang Merah	7.982	6.319	22.579	14.860	35.35	42.53	
6	Bawang putih (bonggol)	2.569	3.330	38.817	29.309	6.62	11.36	
7	Cabai Merah Keriting	11.029	11.157	47.241	38.258	23.35	29.16	
8	Daging Ayam Ras	2.339	3.235	24.939	21.555	9.38	15.01	
9	Telur Ayam Ras	2.024	3.259	27.315	22.595	7.41	14.42	

--	--

10	Daging Sapi Murni	4.887		141.667		3.45		
11	Minyak Goreng	1.112	1.371	15.902	13.667	6.99	10.03	
12	Tepung Terigu	642	452	9.577	7.250	6.70	6.24	
Rata-rata						8.8	11.45	

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

Pada tahun 2024 capaian kinerja terkendalinya harga pangan utama di tingkat konsumen adalah 96,84% dengan target kinerja fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen 9,8% dan realisasi 10,12%. Pencapaian ini sudah **kurang baik** karena lebih besar dari target yang ditetapkan.

Pencapaian ini pun dianggap **kurang baik karena melebihi dari target**. Harga pangan utama ditingkat konsumen dan produsen dinyatakan stabil apabila CV <10%. Semakin <10% Coefisien Variasi semakin stabil harga pangan.

Solusi yang dilakukan pada tahun 2024 untuk pencapaian sasaran kinerja ini pada adalah :

1. Pembinaan bagi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) serta penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui lumbung pangan masyarakat
Pembinaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Gapoktan di wilayah sentra produksi padi agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan/mengolah hasil produksi pangannya disaat menghadapi panen raya mampu menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau bagi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi paceklik
2. Operasi khusus (opsus) melalui Toko Tani Indonesia, gelar pangan murah dan bazar pada hari-hari besar keagamaan
3. Pemantauan harga pangan dilakukan setiap hari oleh enumerator harga pangan. Untuk pemantauan harga pangan ditingkat produsen dilakukan pada Kec. Lembang Jaya, Gunung Talang, Lembah Gumanti, Bukit Sundi dan Kubung. Sedangkan untuk tingkat konsumen dilakukan di pasar Muara Panas, Pasar Selayo, Pasar Talang, Pasar Alahan Panjang dan Pasar Bukit Sileh.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat

SASARAN 5 : MENINGKATNYA MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Mutu dan keamanan pangan didefenisikan sebagai kondisi mempertahankan kualitas pangan dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu (fisik), merugikan dan membahayakan



kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.

Dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan segar khususnya pangan segar asal tumbuhan, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Salah satu yang diatur dalam Peraturan ini adalah tentang mekanisme pendaftaran pangan segar asal tumbuhan sebagai bentuk penjaminan keamanan pangan segar bagi masyarakat.

Untuk menjamin bahwa penanganan pangan hasil pertanian dilaksanakan dengan baik, maka unit usaha pangan hasil pertanian harus mendapatkan pengakuan jaminan mutu pangan hasil pertanian dari pihak yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengakuan tersebut diberikan setelah melalui berbagai tahap penilaian dan memenuhi berbagai persyaratan yang terstandarisasi terhadap pelaku usaha diantaranya adalah Sertifikasi Prima, Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) berupa Registrasi PSAT Pelaku Usaha Rice Milling Unit, Registrasi PSAT bagi Pelaku Usaha Agribisnis (non beras) dan Registrasi Rumah Kemas

Sasaran Meningkatnya mutu dan keamanan pangan segar dapat diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 5.1 : Indikator Pengukur Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Segar

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
1	Persentase bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	90%	80%	100%	125%

Sumber : Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024

Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat diukur dari jumlah sampel pangan segar yang aman dikonsumsi dari hasil pemeriksaan sampel dibandingkan total sampel pangan disuatu tempat pada kurun waktu tertentu.

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran ini adalah 125% dengan indikator kinerja persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat, target kinerja 80% dan realisasi 100%. Pencapaian ini termasuk kategori **Sangat Baik**, karena melebihi 100%

Pengambilan sampel dilakukan dari tingkat produsen (petani) dan pasar pada dua lokus kecamatan yakni Kec. Lembang Jaya dan Kec. Junjung Sirih.

Sampel yang diambil terdiri dari 8 komoditi yakni Cabe Merah, Cabe Hijau, Bawang Merah, Bawang Putih, Tomat, Seledri, Wortel dan Bunga Kol. Dari hasil uji laboratorium, walaupun ada sampel yang terindikasi residu pestisida, masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Sehingga 8 komoditi yang diuji dinyatakan negative dan layak untuk dikonsumsi. Pengujian sampel dilakukan melalui pengujian Laboratorium Keamanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persentase keamanan pangan segar yang aman dikonsumsi berdasarkan uji laboratorium pestisida tahun 2024 adalah 100,00% yang mana dari 8 sampel pangan yang diuji tidak ditemukannya cemaran kimia yang melebihi ambang batas.

Perkembangan capaian target keamanan pangan tahun 2022-2024 dapat digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 5.2 : Perkembangan Ketersediaan Bahan Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi Masyarakat Tahun 2022-2024

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2026	% Capaian Renstra
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	Persentase bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat (%)	80	80	80	70	100	100	87,50	125	125	80	125

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

SASARAN 6 : PENINGKATNYA DIVERSIFIKASI PANGAN MASYARAKAT

Peningkatan Diversifikasi Pangan (penganekaragaman konsumsi pangan) didefinisikan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Tujuan utama diversifikasi pangan adalah membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat dapat diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 6.1 : Indikator Pengukur Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan	85,10	86,5	89,1	103,01%

Sumber : Data Susenas

Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan dengan formulasi Angka Kecukupan Gizi dikali dengan bobot. Penghitungan skor PPH ini menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

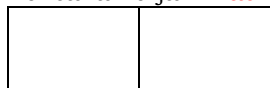
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Kabupaten Solok berdasarkan data Susenas adalah 89,1. Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola Pangan Harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk, sekaligus untuk mempertimbangkan keseimbangan gizi, cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli.

Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Diversifikasi pangan (penganekaragaman konsumsi pangan) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu gizi dengan pola konsumsi yang lebih beragam.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 capaian kinerja peningkatan diversifikasi pangan adalah 103,01%, dengan target 86,5 dan realisasi 89,1. Pencapaian ini termasuk kategori **Sangat Baik**.

Walaupun skor PPH berdasarkan data Susenas melebihi target tapi pencapaian ini masih tidak merata ke semua kelompok pangan, dimana konsumsi pada masing-masing kelompok pangan ada yang naik dan ada yang berkurang. Ada di dalam satu kelompok pangan yang hanya didominasi oleh satu komoditi saja, Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Terbatasnya pendapatan dan daya beli masyarakat dalam menyediakan makanan yang beragam, bergizi dan seimbang;
2. Terbatasnya ketersediaan bahan makanan ditingkat rumah tangga
3. Budaya/kebiasaan makan dimasing-masing daerah/keluarga, karena ada faktor suka atau tidak suka dalam mengkonsumsi pangan tertentu;



4. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pola makan beragam bergizi seimbang dan aman.

SASARAN 7 : MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI

Tata kelola organisasi yang baik (*good organization governance*) dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak Manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi-misi organisasi. Hal ini bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta tercapainya tujuan dan program kerja organisasi secara efektif.

Tujuan Meningkatnya Kinerja Organisasi merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan, pengendalian sumber daya, pelaksanaan kebijakan termasuk hasil pencapaian tujuan dan sasaran baik berupa keberhasilan atau kegagalan yang dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun.

Sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi dapat diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Utama seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 7.1 : Indikator Pengukur Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja

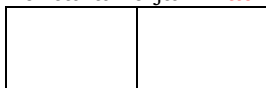
No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
1	Indeks Kepuasan Aparatur	NA	2,75	2,77	100,73

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2024

Meningkatnya tata kelola organisasi dapat diukur dari Indeks Kepuasan Aparatur berdasarkan hasil survey terhadap pelayanan kesekretariatan pada Dinas Perikanan dan Pangan tahun 2024. Formulasi penghitungannya adalah nilai rata-rata dari hasil survey pelayanan sekretariat. Terdapat 10 unsur/komponen yang disurvei.

Berdasarkan hasil survey diperoleh Indeks Kepuasan Aparatur sebesar 2,77 dengan mutu **Baik**.

Komponen yang disurvei adalah : 1) Penyediaan ATK untuk menunjang kelancaran administrasi dan kegiatan bidang; 2) Penyediaan barang cetakan sebagai penunjang kegiatan bidang; 3) Kecukupan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan (laptop, kendaraan operasional, dll); 4) Kebersihan dan kenyamanan kantor; 5) Akses internet sebagai penunjang utama kegiatan harian; 6) Pelayanan terhadap pengurusan administrasi kepegawaian (naik pangkat, gaji berkala, dll) ASN; 7) Pengurusan surat menyurat; 8) Kecepatan proses pelayanan keuangan; 9) Ketepatan waktu pemberitahuan informasi (urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan); 10) Fasilitas ruang rapat.



Tabel 7.2 : Skala Pengukuran

Nilai interval IKM	Mutu Pelayanan	Nilai interval Konversi IKM	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 - 1,75	D	25,00 - 43,75	Tidak Baik
1,76 - 2,50	C	43,76 - 62,50	Kurang Baik
2,51 - 3,25	B	62,51 - 81,25	Baik
3,26 - 4,00	A	81,26 - 100,00	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 capaian kinerja Meningkatnya tata kelola organisasi adalah 105,56%, dengan target 2,75 dan realisasi 2,77. Pencapaian ini termasuk kategori **Baik**.

Sedangkan jumlah nilai yang diperoleh adalah 63,03% dengan rincian sebagai berikut :

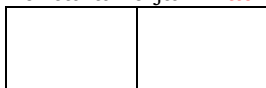
1. Kecukupan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan (laptop, kendaraan operasional, dll) dengan nilai 0,30.
2. Penyediaan barang cetakan sebagai penunjang kegiatan bidang dengan nilai 0,30.
3. Kecukupan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan (laptop, kendaraan operasional, dll) dengan nilai 0,23.
4. Kebersihan dan kenyamanan kantor dengan nilai 0,28.
5. Akses internet sebagai penunjang utama kegiatan harian dengan nilai 0,27.
6. Pelayanan terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian (naik pangkat, gaji berkala, dll) ASN dengan nilai 0,29.
7. Pengelolaan surat menyurat dengan nilai 0,29.
8. Kecepatan proses pelayanan keuangan dengan nilai 0,28.
9. Ketepatan waktu pemberitahuan informasi (urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan) dengan nilai 0,27.
10. Fasilitas ruang rapat dengan nilai 0,27.

Dari hasil survey tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Aparatur pada Dinas Perikanan dan Pangan pada tahun 2024 dengan mutu pelayanan kategori B dan kinerja pelayanan **BAIK**. Indikator kinerja program ini dicapai melalui hasil survey yang dilakukan dilingkup Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 5 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 6 dokumen realisasi 6 dokumen dan capaian 100,00%.



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan perangkat daerah dengan target 14 laporan, realisasi 14 laporan dan capaian 100,00%.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100,00%, realisasi 91,24% dan capaian 91,24%. Karena ada beberapa perjalanan dinas yang tidak bisa dilaksanakan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100,00%, realisasi 91,39 %dan capaian 91,39%. Karena berlebihnya anggaran untuk pembayaran listrik
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan target 100,00%, realisasi 97,58% dan capaian 97,58%.

Untuk pencapaian target kinerja Meningkatnya tata kelola organisasi tahun 2024 terdapat efesiensi penggunaan sumberdaya diantaranya adalah adanya efesiensi anggaran kegiatan sebesar Rp. 437.143.882,- yang merupakan sisa kegiatan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk Meningkatnya tata kelola organisasi adalah :

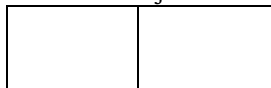
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur
2. Meningkatkan tata kelola organisasi melalui penyediaan sarana prasarana aparatur yang memadai
3. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan aparatur secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi

--	--

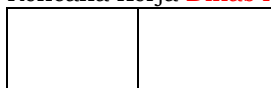
Tabel. T-C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok

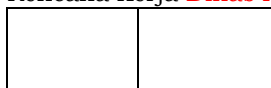
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target dan Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Taun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10	11
2.09	URUSAN BIDANG PANGAN														
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama (beras) perkapita (kg/kap/th)	669,82 kg/kap/th	922.399.707	446,53 kg/kap/th	1.188.842.809	633kg/kap/th		340,36 kg/kap/th	0	53,76	633kg/kap/th	340.627.484	185,5	27,69
2.01	Keg. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	922.399.707	60%	1.188.842.809	0	0	0	0	0	0	0		
	Sub. Keg Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan				2 Unit lumbung pangan saja	1.188.842.809	0	0	0	0		0	0		
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah komoditi pangan strategis yang terkendali harganya	7 komoditi	46.000.000	4 komoditi	106.585.082	7 komoditi	11.201.600	8 komoditi	11.086.750	114,29	2 lap	9.997.200	6	85,7
2.01	Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	Persentase pemenuhan Cadangan Pangan Kab/Kota	10%	113.591.240	0	0	17.512 kg	195.506.732	0	0		10%	189.137.254	0	0



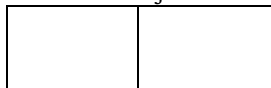
	Sub. Keg. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			0	0	17.512 kg	195.506.732	8842 kg	192.388.346	50,49	11100 kg	189.137.254		
2.02	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penurunan fluktuasi harga	0,6 0%	46.000.000		27.745.000	0,6 0%	11.201.600		11.086.750		2 lap	9.997.200	0,3	50
	Sub. Keg. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan			1 dok	13.830.000	2 lap	11.201.600	2 lap	11.086.750	100	2 lap	9.997.200		
	Sub. Keg. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dibina				13.915.000	0	0	0	0		0	0		
2.03	Keg. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen harga minimum pangan lokal yang disusun	1 dok	2.000.000	0	0	1 dok	0	0	0		0	0	0	0
2.04	Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pemenuhan Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	61,50%	70.000.000	50, 5%	78.840.082	60%	124.795.840	50,5%	114.625.50	84,17	60%	100.046.040	25	40,65
	Sub. Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 KW T	78.840.082	1 lap	124.795.840	1 lap	114.625.50	100	1 lap	100.046.040		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	9,46%	250.000.000	13, 51	0	13,51	0	6,76	0	199,85	0	0	0	0
	Keg. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Bantuan Paket Bahan Pangan	100 paket	250.000.000	0	0	100 paket	0	0	0	0	0	0		
	Keg. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Disusun	1 dok	20.000.000	1 dok	0	1 dok	0	1 dok	0	100	0	0		



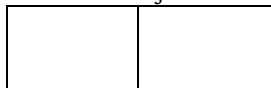
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	10 komoditi	162.775.384	7 komoditi	56.476.309	10 komoditi	17.771.570	10 komoditi	17.385.000	100	7 komoditi	11.801.570	2	20
2.01	Keg. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	100%	162.775.384	100%	56.476.309	100%	17.771.570	100%	17.385.000	100	100%	11.801.570	50	50
	Sub. Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				10 sample	56.476.309	1 dok	17.771.570	1 dok	17.385.000	100	100%	11.801.570		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAM DAN PERIKANAN														
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang terlaksananya urusan pemerintah daerah	100%	5.903.252.445	100%	3.730.513.38	100%	3.966.526.216	100%	3.778.028.538	100	100%	3.845.147.693	56,86	56,86
2.01	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dok	298.707.000	6 dok	209.056.904	6 dok	240.099.856	6 dok	233.660.439	100	6 dok	180.988.738	5	83,3
	Sub. Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			2 dok	102.595.477	1 dok	116.143.736	1 dok	113.349.882	100	1 dok	86.709.544		
	Sub. Keg Kooordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD			1 dok	8.895.300	1 dok	2.861.850	1 dok	2.798.850	100	1 dok	3.471.850		
	Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD			1 dok	8.932.000	1 dok	5.729.700	1 dok	5.570.700	100	1 dok	3.793.700		



	Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			3 dok	88.634.127	3 lap	115.364.570	3 dok	111.941.007	100	3 laporan	87.023.644		
2.02	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	14 dok	4.499.657.257	14 lap	2.938.517.766	14 lap	2.938.517.766	14 lap	2.809.411.790	100	14 lap	2.983.790.235	8	57,14
	Sub. Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			31 org	2.929.294.666	31 org	2.929.294.666	31 org	2.800.582.630	100	31 org	2.976.757.135		
	Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			1 dok	9.306.375	1 dok	4.818.250	1 dok	4.637.250	100	1laporan	3.828.250		
	Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			13 dok	6.240.000	13 lap	4.404.850	13 dok	6.240.000	100	13 laporan	3.204.850		
2.03	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana prasarana dan pelayanan administrasi perkantoran	100%	531.100.000	100%	367.324.491	100%	435.306.491	99,40 %	396.979.172	99,4	100%	282.817.290	51,40	51,4
	Sub. Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			10 0%	2.977.600	1 paket	6.509.470	1 paket	6.509.470	100	1 paket	5.009.620		



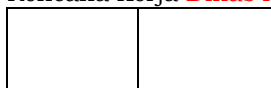
	Sub. Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			10 0%	34.410.000	1 paket	6.600.000	1 paket	5.200.000	100	1 paket	6.600.000		
	Sub. Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			10 0%	44.825.300	1 paket	61.935.170	1 paket	60.239.420	100	1 paket	40.237.020		
	Sub. Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			10 0%	15.230.825	1 paket	18.302.370	1 paket	17.250.000	100	1 paket	21.211.650		
	Sub. Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			10 0%	269.880.766	1 laporan	341.960.000	1 laporan	307.779.382	100	1 laporan	209.759.000		
2.04	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	107.463.188	100 %	54.234.815	100%	57.177.978	100%	44.776.480	100	100%	57.912.738	57,60	57,6
	Sub. Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			10 0%	996.500	1 laporan	1.000.000	1 laporan	996.500	100	1 laporan	1.000.000		
	Sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan			10 0%	27.771.240	1 laporan	38.516.280	1 laporan	26.825.230	100	1 laporan	38.516.280		
	Sub. Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			10 0%	14.650.000	1 laporan	9.010.000	1 laporan	8.320.000	100	1 laporan	10.720.000		
	Sub. Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			10 0%	10.817.075	1 laporan	8.651.698	1 laporan	8.634.758	100	1 laporan	7.676.458		



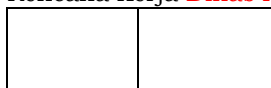
2.05	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	441.325.000	100%	256.280.402	100%	295.423.656	100%	293.200.657	100	100%	339.628.692	45	45
	Sub. Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			100%	219.241,793	37 unit	256.667.628	37 unit	255.558.661	100	37 unit	304.119.196		
	Sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			100%	37.038.609	2 org/bln	38.756.028	2 org/bln	37.641.996	100	2 org/bulan	35.509.496		
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	5,6 %	1.490.458.961	49,26%	111.654.085	5,6	248.510.852	13,51 %	237.317.188	241,25	627 ton		15,7	280,36
2.01	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	35 unit	1.270.458.961	9 unit	111.654.085	7 unit	248.510.852	21 unit	237.317.188	300	7 unit	146.991.354	0	
	Sub Keg Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	jumlah kelompok yang terbina			100%	111.654.085	32 klp	248.510.852	36 klp	237.317.188	112,5	7 unit	146.991.354		
	Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	10 klp	220.000.000	10	0	10	0	0	0		10	0	0	
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase nagari yang telah menyusun regulasi penggunaan alat tangkap	6,76%	400.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
	Keg. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kota/kab	Jumlah dokumen Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air	1 dok	400.000.000	0	0	0	0	0	0		1 dok	0	0	0

--	--

		Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam Kab/Kota													
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya(%)	9,30%	768.693.861	60,06%	698.210.536	8,25	874.705.185	9,56%	802.168.660	115,88	8,25 %	563.997.260	9	96,77
	Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan	10	10.000.000	0	0	0	0	0	0		2	0	0	
	Keg. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	10	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
2.02	Keg Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya yang diberdayakan	6,76%	20.000.000	20 klp	13.205.000	20 klp	33.899.700	20 klp	30.700.450	100	20 klp	23.997.730	0	0
	Sub. Keg Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase jumlah pelaku usaha perikanan yang ikut pelatihan			20 klp	13.205.000	20 klp	33.899.700	20 klp	30.700.450	100	20 klp	23.997.730		
2.04	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pengembangan kelompok budidaya perikanan	100 klp	728.693.861	25 klp	685.005.536	2 unit	840.805.485	6 unit	771.468.110	300	3 unit	539.997.296	0	0
	Sub Keg Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penyedia prasarana perikanan				273.951.536	1 unit	360.439.270	1 unit	353.719.640	100	1 unit	339.907.310		
	Sub Keg Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penyediaan sarana perikanan				381.034.000	1 unit	480.366.215	5 unit	417.748.470	500	2 unit	200.089.986		
	Sub. Keg Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kasus dan pengujian kualitas perairan di kelompok dan UPR			0	0	0	0	0	0		0	0		



	Sub. Keg Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase jumlah kelompok pembudidayaan ikan yang di berikan pembinaan			0	18.730.000	0	0	0	0		0	0		
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (kg)	103100 kg	128.115.643	66 220 kg	241.017.318	67790 kg	213.327.340	67790 kg	180.526.352	100	67790 kg	180.526.352	35131	34,07
	Keg. Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1 rekomen dasi	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.02	Keg Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah kelompok pengolah yang mengalami peningkatan SDM Mutu dan Keamanan hasil Perikanan	22 klp	45.115.643	22 klp	30.506.609	22 klp	25.004.100	24 klp	23.382.750	109,09	24 klp	23.382.750	12	54,54
	Sub. Keg Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok yang terbina			30.506.609		22 klp	25.004.100	24 klp	23.382.750	109,09	24 klp	25.004.200		
2.03	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	0,6 ton	78.000.000	21 0.5 10. 709		0,5 ton	188.323.140		157.143.602		0,6 ton	34.994.200	0	0
	Sub. Keg Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi gemar makan ikan			14 kec	210.510.709	14 kec	188.323.140	14 kec	157.143.602	100	14 kec	34.994.200		



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal

Melihat kondisi tersebut di atas maka Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok berupaya untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

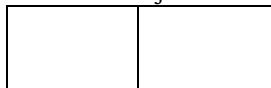
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan Wajib Ketahanan Pangan dan urusan pilihan Kelautan dan Perikanan.

--	--

Tabel T-C 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (thnn-2)	2024 (thn n-1)	2025 (thn n)	2026 (thn n+1)	2024 (thn n-2)	2025 (thn n-1)	2025 (tahun n)	2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8					
1.	Persentase peningkatan produksi perikanan			7,91	8,23	8,55	8,61	8,82		8,55	10,50	
2.	Angka Konsumsi Ikan			39,15	40,10	21,98	22	42,39		41	44	
3.	Jumlah ketersediaan pangan utama perkapita			633	645,20	657,40	669,82	444,48		657,40	669,82	
4.	Persentase Coefisien Variasi harga pangan strategis ditingkat konsumen dan produsen			10,30	9,80	9,50	8,9	10,12		9,50	8,9	
5.	Persentase bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat			80	80	80	80	100		80	80	
6.	Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH)			86	86,5	87,50	87,5	89,1		87,50	87,5	
7.	Indeks Kepuasan Aparatur			2,7	2,75	2,85	2,85	2,77		2,85	2,85	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sektor perikanan dan pangan memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional umumnya dan Kabupaten Solok khususnya. Kabupaten Solok mempunyai keunggulan komparatif di bidang perikanan dan pangan, dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti pangan, hortikultura, peternakan maupun perikanan. Potensi yang dimiliki antara lain iklim dan agro ekosistem yang sesuai, tersedianya sumberdaya genetik yang melimpah, tersedianya SDM (petani dan petugas), dukungan kebijakan pemerintah dan jumlah penduduk yang besar.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, perlu dilakukan analisa terhadap kondisi objektif perikanan dan ketahanan pangan. Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai tantangan berkenaan dengan penerapan teknologi, kondisi sumberdaya alam, prasarana dan sarana produksi, sumberdaya manusia dan kelembagaan. Dalam pengembangan pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan terdapat berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi.

Tantangan Pelayanan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok berdasarkan analisa Renstra Dinas Perikanan dan Pangan, analisa RPJMD Kabupaten Solok, analisa RTRW, dan analisa KLHS yang sekaligus merupakan isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
Berkembangnya bagan di wilayah Danau Singkarak yang termasuk wilayah Kabupaten Solok dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil berjumlah 175 unit dengan rincian : Nagari Kacang 23 unit, Nagari Tikalak 45 unit, Nagari Singkarak 3 unit, Nagari Saniangbaka 62 unit, Nagari Muaro Pingai 25 unit dan Nagari Paninggahan 17 unit. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Bung Hatta bekerja sama dengan Dinas Perikanan hasil tangkapan dari bagan terdiri dari 19,56% larva, 32,90% juvenil dan 47,33% ikan bilih dewasa. Artinya sebanyak 52,55% ikan yang tertangkap tidak memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan data tersebut tingkat keberlanjutan kelestarian ikan bilih sangat rendah (terancam).
2. Masih kurangnya diversifikasi pengolahan hasil perikanan di kalangan masyarakat
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan.
Untuk memenuhi kebutuhan benih ikan ini di Kabupaten Solok sudah dibangun Balai Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Nagari Sungai Janieh Kecamatan Gunung Talang dan instalasi yang berada di Nagari Koto baru Kecamatan Kubung. Namun BBI sendiri sampai saat ini belum berfungsi optimal sehingga masih perlu ditingkatkan untuk menunjang peningkatan produksi ikan air tawar. Di samping itu masyarakat Kabupaten Solok juga sudah dapat memproduksi benih sendiri melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang sudah berjumlah 76 unit sampai dengan akhir tahun 2024. Namun untuk memenuhi permintaan akan benih dan induk ikan di Kabupaten Solok masih belum mencukupi dan masih didatangkan dari luar daerah.
4. Masih kurangnya diseminasi teknologi perikanan di tengah masyarakat
Secara umum usaha perikanan masih merupakan usaha sambilan di samping usaha utama masyarakat Kabupaten Solok yang merupakan petani. Usaha perikanan masih dilaksanakan secara tradisional dengan

--	--

- skala usaha yang masih kecil. Sedangkan untuk peningkatan nilai tambah baru beberapa masyarakat yang mampu melaksanakan teknologi pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar kelayakan produk.
5. Alih fungsi lahan ke non pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan ke non pertanian berdampak terhadap produksi bahan pangan masyarakat yang berasal dari sektor pertanian, perikanan dan peternakan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya sangat tergantung pada lahan pertanian yang akhirnya akan mengganggu stabilitas ketahanan dan kedaulatan pangan masyarakat. Lahan pertanian Kabupaten Solok pada tahun 2024 berdasarkan Solok dalam angka tahun 2024 seluas 18.500 Ha sedangkan keadaan tahun 2023 seluas 19.965 Ha.
 6. Masih adanya daerah rawan pangan di Kabupaten Solok
Berdasarkan peta rawan pangan tahun 2024 masih terdapat daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Solok sebanyak 3 Nagari (2,1%) dari 74 Nagari yang ada, yaitu Garabak Data, Koto Laweh, Katialo)
 7. Masih ditemukannya pangan yang terpapar zat pestisida yang dikonsumsi masyarakat. Walau kandungan zat nya masih dibawah ambang batas.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang setiap tahun dilakukan masih ditemukan adanya kandu bngan zat/residu yang berbahaya yang ditemukan pangan segar yang dijual masyarakat dan demikian juga halnya dengan pangan olahan.
Teknik bercocok tanam yang banyak digunakan saat ini oleh petani di Kabupaten Solok adalah teknik budidaya yang banyak memanfaatkan zat kimia buatan seperti pupuk buatan, insektisida, fungisida, herbisida, pestisida dan zat lainnya yang mendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura. Pemanfaatan zat kimia buatan tersebut mampu merusak keseimbangan ekosistem dan mengganggu kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Hal tersebut mengganggu tujuan penyediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan bagi konsumsi masyarakat serta tujuan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber pangan nasional.
Di samping teknik budidaya produksi, bahan pangan yang beredar di pasar perlu diawasi karena adanya sebagian oknum pedagang dan produsen menambahkan zat kimia yang tidak aman dikonsumsi oleh manusia ke dalam bahan pangan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa, tampilan, dan umur penyimpanan. Rendahnya pengawasan terhadap peredaran bahan pangan yang beredar menghambat terpenuhinya tujuan penyediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat.
 8. Masih rendahnya penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan ditentukan oleh skor pola pangan harapan (PPH). Untuk Kabupaten Solok skor PPH sudah tinggi, namun masih ditemukan fakta masih adanya kebiasaan buruk dalam pola konsumsi di sebagian masyarakat Kabupaten Solok karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, seimbang dan aman, kebiasaan konsumsi beras/nasi sebagai pangan pokok yang wajib dimakan setiap jadwal makan serta berkembangnya industri pangan yang siap saji.

--	--

9. Fluktuasi harga pangan pokok strategis
- Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, sifat produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan buruknya infrastruktur yang berkonsekuensi terhadap ongkos angkut yang tinggi, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat secara ekonomi menurun sehingga kondisi ketahanan pangan terganggu.

Sedangkan peluang Dinas Perikanan dan Pangan terhadap peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Potensi sumberdaya alam yang mendukung usaha perikanan
2. Tingginya minat masyarakat dalam membudidayakan ikan
3. Tingginya permintaan akan hasil perikanan
4. Berkembangnya teknologi perikanan yang ramah lingkungan
5. Terbukanya peluang investasi untuk pengembangan perikanan dan pangan melalui skim pembiayaan dalam bentuk kredit dengan bunga rendah
6. Minat masyarakat untuk melakukan usaha pengolahan perikanan
7. Dukungan kebijakan pemerintah propinsi dan pusat dalam sektor perikanan dan ketahanan pangan
8. Potensi produksi bahan pangan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
9. Tingginya permintaan masyarakat akan bahan pangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya gizi sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk
10. Tumbuhnya industri-industri pangan olahan
11. Tersedianya sumberdaya lahan pekarangan yang cukup luas di setiap rumah tangga
12. Peningkatan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan
13. Tersedianya beranekaragam produk bahan pangan dan olahan pangan

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2026, Program Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026 agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan analisa kebutuhan, dengan keterbatasan anggaran yang di berikan kepada Dinas Perikanan dan Pangan, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2026. Diantarnya :

1. Kegiatan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2. Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota

--	--

- 3. Kegiatan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kab/kota
- 4. Kegiatan Penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil dalam satu daerah kab/kota
- 5. Kegiatan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil

Sedangkan pengusulan progam dan kegiatan masyarakat belum bisa di sebutkan dalam Renja 2026 ini karena belum terlaksananya Musrenbang sebagai bahan usulan dari masyaratat terhadap SKPD.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dapat diperoleh melalui hasil musrenbang mulai dari tingkat nagari sampai dengan forum Perangkat Daerah dan musrenbang propinsi serta adanya usulan kegiatan melalui proposal yang telah disampaikan oleh kelompok masyarakat melalui kelompok tani ternak dan kelompok perikanan.

Usulan/proposal yang berupa pengadaan/bansos pangan ataupun sarana prasarana perikanan untuk tahun 2026 akan diseleksi, diverifikasi dan identifikasi berdasarkan kesiapan SDM penerima manfaat, kelengkapan persyaratan dan administrasi serta kesesuaian kondisi agroklimat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perikanan dan Pangan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2026 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD), agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

--	--

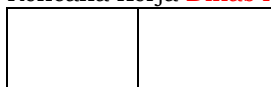
Tabel T-C 31 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Solok

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan dan Pangan

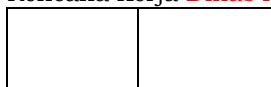
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	5.499.062.731	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Solok	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	263.050.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Solok	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab. Solok	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun tepat waktu	14 dokumen	4.239.541.481	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab. Solok	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun tepat waktu	14 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Solok	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	468.825.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Solok	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok	Jumlah pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2 unit	20.200.000	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan P emerintahan Daerah	Kab. Solok	Jumlah pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2 unit		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	90.946.250	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	416.500.000	Keg. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%		

--	--

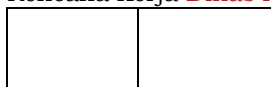
URUSAN WAJIB PANGAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Jumlah ketersediaan pangan utama perkapita	657,4 kg/kap/thn	860.929.351	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaualatan dan Kemandirian Pangan		Jumlah ketersediaan pangan utama perkapita	657,4 kg/kap/thn		
	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pemenuhan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	94,59	860.929.351	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pemenuhan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	94,59		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah	40%	98.290.872	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah	40%		
	Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pemenuhan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	10	98.290.872	Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pemenuhan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	10		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	10,81%	230.000.000	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	10,81%		
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah bantuan paket bahan pangan	100 paket	230.000.000	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 paket		
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerantanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Solok	Peta kerantanan dan ketahanan pangan kecamatan yang disusun	1 dokumen	20.000.000	Kegiatan Penyusunan Peta Kerantanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Solok	Peta kerantanan dan ketahanan pangan kecamatan yang disusun	1 dokumen		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Jumlah komoditi pangan strategis yang terkendali harganya	7	46.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Jumlah komoditi pangan strategis yang terkendali harganya	7		
	Keg. Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Solok	Persentase penurunan fluktuasi harga	0.30	44.000.000	Keg. Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Solok	Persentase penurunan fluktuasi harga	0.30		



	Keg. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi	Kab. Solok	Jumlah dokumen harga minimum pangan lokal yang disusun	1 dokumen	2.000.000	Keg. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi	Kab. Solok	Jumlah dokumen harga minimum pangan lokal yang disusun	1 dokumen		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Skor PPH Konsumsi	90,1	70.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Skor PPH Konsumsi	90,1		
	Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Solok	Jumlah kelompok yang difasilitasi/dibantu dalam penyediaan pangan yang beragam tingkat rumah tangga	3	70.000.000	Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Solok	Jumlah kelompok yang difasilitasi/dibantu dalam penyediaan pangan yang beragam tingkat rumah tangga	3		
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	10	158.591.921	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	10		
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	100%	158.591.921	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	100%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	1.100,19 ton	1.391.132.127	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	1.100,19 ton		
	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	10 unit	1.171.132.127	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	10 unit		
	Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota	Kab. Solok	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	1 klp	220.000.000	Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota	Kab. Solok	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	1 klp		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	5.708,22 ton	717.466.736	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kab. Solok	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	5.708,22 ton		



	Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan	2	6.000.000	Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan	2		
	Keg. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	10	6.000.000	Keg. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	10		
	Keg. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Solok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	20 klp	20.000.000	Keg. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Solok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 klp		
	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Solok	Jumlah pengembangan kelompok budidaya perikanan	100 kelompok	685.466.736	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Solok	Jumlah pengembangan kelompok budidaya perikanan	100 kelompok		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Angka Konsumsi Ikan	22 kg/kap	119.577.789	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Angka Konsumsi Ikan	22 kg/kap		
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Solok	Jumlah kelompok pengolah yang mengalami peningkatan SDM mutu dan keamanan hasil perikanan	22 kelp	40.577.789	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Solok	Jumlah kelompok pengolah yang mengalami peningkatan SDM mutu dan keamanan hasil perikanan	22 kelp		
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	0,600 ton	74.000.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	0,6 ton		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Luas Kawasan Konservasi	0	350.000.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Luas Kawasan Konservasi	0		-
	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah dokumen Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam Kab/Kota	1 dok	350.000.000	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah dokumen Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam Kab/Kota	50 dok		-
	TOTAL				9.563.451.710	TOTAL					



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Karena pembuatan Renja 2026 dilakukan di pertengahan tahun 2025, maka merujuk ke RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 adalah Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut diwujudkan dalam delapan Misi yang dikenal sebagai Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Presiden menetapkan beberapa arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Asta Cita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Arahan tersebut mencakup :

1. Pemerintah bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, termasuk rakyat kecil dan tertinggal.
2. Setiap aspirasi yang murni akan dihormati dan ditindaklanjuti.
3. Aparat ditugaskan untuk melindungi keselamatan warga serta menjaga fasilitas umum.
4. Memastikan koordinasi antara pusat dan daerah agar berjalan dengan baik termasuk dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
5. BIN diminta sigap melaporkan dinamika lapangan dan TNI menjaga keamanan wilayah serta mencegah penyalahgunaan SDA.
6. Kapolri dan Jaksa Agung didorong mempercepat proses hukum terhadap pelanggaran

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri



dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

- 1) Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan :
 - a. Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
 - b. GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
 - c. Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
 - d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
- 2) Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan *Global Power Index* menjadi peringkat 29 di tahun 2029
- 3) Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan :
 - a. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
 - b. Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
 - c. Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
- 4) Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
- 5) Sasaran Pembangunan 5 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju net Zero emission yang ditandai dengan :
 - a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2002
 - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029.

Untuk mencapai target dalam Asta Cita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, diversifikasi dan penguatan pasokan, (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian melalui hilirisasi dan pengembangan produk turunan bernilai tinggi dan (3) Mewujudkan pengelolaan Kementarian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sasaran utama pembangunan 2025-2029 adalah (1) meningkatnya pendapatan per kapita, (2) pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, (4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia, (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor perikanan dan pangan dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan

--	--

pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Pangan

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka panjang tahun 2025-2045 yakni: *“Transformasi pangan dan pertanian sebagai cara mewujudkan visi berdaulat, maju dan berkelanjutan”*. Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

- 1. Mewujudkan ketahanan pangan
 - 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
 - 3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.
- BKP mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan tahun 2025-2029 adalah: penguatan ketersediaan, stabilitas pasokan dan harga serta peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, infrastruktur yang lebih baik, distribusi yang efisien dan pemberdayaan petani skala kecil.

Kebijakan ketahanan pangan difokuskan pada: (a) peningkatan produksi melalui subsidi pupuk, pencetakan sawah baru, intensifikasi lahan dan penyediaan alat mesin pertanian; (b) penguatan rantai pasok; (c) stabilitas harga dan ketersediaan; (d) peningkatan kualitas konsumsi dan (e) pemberdayaan masyarakat.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Yang menjadi visi pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Sedangkan yang menjadi misi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
- 2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
- 3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
- 4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

--	--

Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Faktor penghambat yang menyebabkan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya ketersediaan bibit ikan yang berkualitas;
2. Masih terbatasnya sarana prasarana perikanan dan pangan serta infrastruktur pendukung;
3. Masih sedikit petani dan pembudidaya ikan/nelayan yang mampu ataupun yang mengolah hasil produk perikanan dan pangan dan menguasai pasar sehingga nilai tukar masih rendah;
4. Berkembangnya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
5. Pengembangan agribisnis dari hulu sampai ke hilir dalam bentuk kawasan belum optimal pelaksanaannya ;
6. Masih banyaknya pembudidaya yang belum menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) bagi pembudidaya dan pembenih ikan dan HACCP;
7. Masih kurang SDM perikanan dan pangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029.

Tujuan yang ingin dicapai pada Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok pada Renstra 2025-2029 adalah Mewujudkan ketersediaan pangan dan produksi perikanan yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran, kendala, tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

--	--

Sasaran pada Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2026 untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan masih mengacu pada Renstra dan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai mana berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	28,8%
	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,1
	Meningkatkan penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	6,76%
	Meningkakan pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	90%
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.100,19 ton
	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	5.708,22 ton
	Meningkatkan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan konservasi	-
	Meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	22 kg/kap

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tabel berikut :

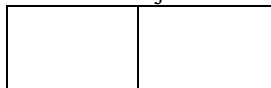
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN SOLOK**

Nama PERANGKAT DAERAH : Dinas Perikanan dan Pangan

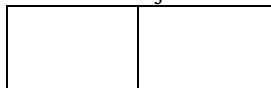
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Dana/Pagu Indikatif			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.357.591.466			8.724.968.485
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				6.985.275.058			8.724.968.485
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%		4.141.827.657			5.044.679.181
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen		180.400.428			235.988.913
	1 2 01 Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	Kab. Solok	76.986.612		1 dokumen	103.516.934
	1 2 01 00 Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Kab. Solok	405.000		1 dokumen	2.709.000
	1 2 01 00 05 Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Kab. Solok	405.000		1 dokumen	2.624.400

--	--

		1	2	01	00 06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	Kab. Solok	102.513.816		3 laporan	127.138.579
		01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun tepat waktu	14 dokumen		3.156.062.222		14 dokumen	3.810.680.748
		01	2	02	00 01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bln	Kab. Solok	3.155.252.222		22 orang/bln	3.805.748.748
		01	2	02	00 05	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kab. Solok	405.000		1 laporan	2.286.000
		01	2	02	00 07	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	Kab. Solok	405.000		13 laporan	2.646.000
		01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		209.019.371		100%	441.616.147
		01	2	06	00 01	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Solok	3.769.952		1 paket	8.922.420
		01	2	06	00 02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Solok	21.905.302		1 paket	10.000.000
		01	2	06	00 04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Solok	45.944.092		1 paket	69.600.480
		01	2	06	00 05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kab. Solok	9.893.025		1 paket	27.908.847
		01	2	06	00 09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Dalam & luar Kab. Solok	127.507.000		1 laporan	325.184.400



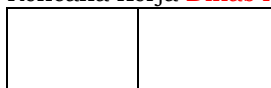
		01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kab. Solok	0			0
		01	2	07	00 05	Pengadaan Mebeler	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>1 unit</i>	Kab. Solok	0			0
		01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		57.776.438		100%	69.819.816
		01	2	08	00 01	<i>Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>1 laporan</i>	Kab. Solok	<i>1.000.000</i>		<i>1 laporan</i>	<i>2.394.810</i>
		01	2	08	00 02	<i>Sub Keg. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>1 laporan</i>	Kab. Solok	<i>38.169.240</i>		<i>1 laporan</i>	<i>45.803.088</i>
		01	2	08	00 03	<i>Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 laporan</i>	Kab. Solok	<i>10.350.000</i>		<i>1 laporan</i>	<i>12.420.000</i>
		01	2	08	00 04	<i>Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 laporan</i>	Kab. Solok	<i>8.257.198</i>		<i>1 laporan</i>	<i>9.201.918</i>
		01	2	09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%		538.569.198			486.573.557
		01	2	09	00 01	<i>Sub Keg. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	<i>5 unit</i>	Kab. Solok	<i>219.755.994</i>		<i>5 unit</i>	<i>425.308.268</i>
		1	2	09	00 09	<i>Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</i>	<i>1 unit</i>	Kab. Solok	<i>318.813.204</i>		<i>1 unit</i>	<i>61.265.289</i>
	2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			Kab. Solok	<i>1.000.000</i>			<i>12.918.540</i>



		02	2	01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Solok	1.000.000			12.918.540
			2	01	00 03	Sub Keg. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	0 unit	Kab. Solok	1.000.000			12.918.540
2	09	03				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH)	90,1		556.211.000			888.600.000
2	09	03	2	01		Keg. Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penurunan fluktuasi harga	0,60%		176.211.000			1.000.000
						Sub keg Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Solok	0			0
2	09	03	2	01	00 09	Sub keg Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	Kab. Solok	90.000.000			0
						Sub keg. Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok pangan	1 dokumen	Kab. Solok	15.000.000			0
2	09	03	2	01	00 12	Sub keg. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 laporan	Kab. Solok	41.211.000			1.000.000
2	09	03	2	01	00 13	Sub keg. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Solok	15.000.000			0
2	09	03	2	01	00 16	Sub keg. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan	1 dokumen	Kab. Solok	15.000.000			0
2	09	03	2	02		Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			Kab. Solok	30.527.204			56.691.360
2	09	03	2	02	00 03	Sub keg. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 ton	Kab. Solok	30.527.204			56.691.360

--	--

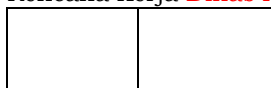
2	09	03	2	04		Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok yang difasilitasi/dibantu dalam penyediaan pangan yang beragam tingkat rumah tangga	3 klp	Kab. Solok	376.000.000			860.779.991
2	09	03	2	04	00 01	Sub keg. Penyusunan dan Penerapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	Kab. Solok	0		1 dokumen	40.000.000
2	09	03	2	04	00 02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	1 laporan	Kab. Solok	376.000.000		1 laporan	820.779.991
2	09	04				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	6,76%		127.000.000		6,76%	179.778.060
2	09	04	2	01		Keg. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketaanan Pangan Kecamatan	Peta kerentanan dan ketaanan pangan kecamatan yang disusun	1 dok	Kab. Solok	0		1 dok	15.000.000
2	09	04	2	01	00 01	Sub keg. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 dok	Kab. Solok	0		1 dok	15.000.000
2	09	04	2	02		Keg. Penanganan Kerawanan Keamanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan paket bahan pangan	100 paket	Kab. Solok	127.000.000			164.778.060
2	09	04	2	02	00 02	Sub Keg. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Keamanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah pengadaan, Pengeloan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	Kab. Solok	127.000.000		1 dok	149.778.060
2	09	04	2	02	00 05	Sub keg. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 dok	Kab. Solok	0		1 dok	15.000.000
2	09	04	2			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	10		19.000.000			44.498.600



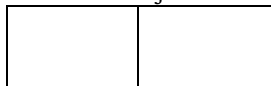
2	09	04	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	1 dok	Kab. Solok	19.000.000			44.498.600
						Sub keg. Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 dok	Kab. Solok	0			25.000.000
						Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 dok	Kab. Solok	19.000.000			19.498.600
3	25	03				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	1.100,19 ton		1.000.000		1.113,90 ton	556.088.285
3	25	03	2	01		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	0 unit		1.000.000		35 unit	336.088.285
3	25	03	2	01	00 01	Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di perairan darat dalam satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 dokumen	Kab. Solok	0		1 dokumen	120.129.916
3	25	03	2	01	00 02	Sub Keg. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	0 unit	Kab. Solok	1.000.000		35 unit	215.958.369
3	25	03	2	02		Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang Diberdayakan	10 klp	Kab. Solok	0		10 klp	220.000.000
3	25	03	2	02	01	Sub. Keg. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan kecil yang Meningkatkan Kapasotasnya (orangnya)	110 orang	Kab. Solok	0		110 orang	220.000.000
3	25	04				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	5.708,22 ton	Kab. Solok	405.271.864		5.723,72 ton	1.272.061.559
3	25	04	2	02		Keg. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	20 klp	Kab. Solok	10.720.000		25 klp	36.387.854
3	25	04	2	02	01	Sub. Keg. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	20 kelompok	Kab. Solok	10.720.000		25 kelompok	36.387.854

--	--

3	25	04	2	04		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pengembangan kelompok budidaya perikanan	161 kelompok		394.551.864		161 kelompok	1.235.673.705
3	25	04	2	04	02	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 daerah Kab/kota</i>	<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)</i>	<i>1 unit</i>	<i>Kab. Solok</i>	<i>265.992.040</i>		<i>1 unit</i>	<i>570.000.000</i>
3	25	04	2	04	04	<i>Sub Keg. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam satu daerah kab/kota</i>	<i>Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>Kab. Solok</i>	<i>10.720.000</i>		<i>1 dokumen</i>	<i>10.720.000</i>
3	25	04	2	04	00 08	<i>Sub keg. Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</i>	<i>0 dokumen</i>	<i>Kab. Solok</i>	<i>0</i>		<i>0 dokumen</i>	<i>2.000.000</i>
3	25	04	2	04	00 09	<i>Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</i>	<i>1 unit</i>	<i>Kab. Solok</i>	<i>107.119.824</i>		<i>1 unit</i>	<i>580.797.189</i>
3	25	04	2	04	00 10	<i>Sub keg. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</i>	<i>Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat</i>	<i>10 klp</i>	<i>Kab. Solok</i>	<i>10.720.000</i>		<i>50 klp</i>	<i>22.156.516</i>
3	25	04	2	04	00 13	<i>Sub keg. Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan</i>	<i>Jumlah Sarana Prasarana unit Pengelolaan Kesehataan Ikan dan Lingkungan yang tersedia</i>	<i>1 unit</i>	<i>Kab. Solok</i>	<i>0</i>		<i>1 unit</i>	<i>50.000.000</i>
3	25	05				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi	0	<i>Kab. Solok</i>	0		0	385.000.000
3	25	05	1	02		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kota/kab	3 dok	<i>Kab. Solok</i>	0		3 dok	150.000.000
3	25	05	2	01	00 04	<i>Sub Keg Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha pembudidaya ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	<i>48 pelaku usaha</i>	<i>Kab. Solok</i>	0		<i>50 pelaku usaha</i>	<i>50.000.000</i>



3	25	05	2	01	00 06	Sub keg Pengawasan Usaha pemasaran hasil penangkapan ikan dan/atau Usaha pengolahan hasil perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil penangkapan ikan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	25 pelaku usaha	Kab. Solok	0		25 pelaku usaha	50.000.000
3	25	05	2	01	00 07	Sub keg Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	25 pelaku usaha	Kab. Solok	0		29 pelaku usaha	50.000.000
3	25	06				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap)	22 kg/kap	Kab. Solok	255.054.511		22,30 kg/kap	341.344.260
3	25	06	2	01		Keg. Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			Kab. Solok	0		Kab. Solok	15.000.000
3	25	06	2	01	00 05	Sub keg. Penyediaan Data Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan skala usaha dan resiko	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	1 doumen	Kab. Solok	0	1 doumen	Kab. Solok	15.000.000
3	25	06	2	02		Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pengolah yang mengalami peningkatan SDM mutu dan keamanan hasil perikanan	22 kelp	Kab. Solok	4.000.000	22 kelp	Kab. Solok	55.000.000
3	25	06	2	02	00 02	Sub keg. Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko	Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang nebdapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko	23 Unit usaha	Kab. Solok	4.000.000	23 Unit usaha	Kab. Solok	55.000.000
3	25	06				Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	6.862,38 ton	Kab. Solok	251.054.511		6.936,75 ton	251.344.260



3	25	06	2	03	01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	6.862,38 ton	Kab. Solok	251.054.511		6.936,75 ton	231.344.260
3	25	06	2	03	02	Sub keg. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	10 pelaku usaha	Kab. Solok	0			20.000.000
						TOTAL				5.357.591.466			8.724.968.485

--	--

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029. Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Pangan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 sebagaimana berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	28,8%
	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,1
	Meningkatkan penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	6,76%
	Meningkakan pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	90%
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.100,19 ton
	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	5.708,22 ton
	Meningkatkan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan konservasi	-
	Meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	22 kg/kap

Indikator kinerja sub kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada Permendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Rencana program kegiatan tahun 2026 disusun berdasarkan potensi ekonomi masyarakat yang umumnya hidup bertani dan berusaha dibidang perikanan dan pangan serta mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih yakni antara lain dalam upaya pencapaian visi **“Kabupaten Solok Terbaik, Maju dan Berkelanjutan”**. Serta dalam upaya untuk mencapai misi yakni Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata. Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 8 program (4 Program di Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan 4 Program di Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan) dan 32 kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perikanan dan Pangan pada anggaran tahun 2026 dengan rencana alokasi dana Rp. 5.357.591.466,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Solok.

--	--

Rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 4.141.827.657,- dengan 5 kegiatan
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan dana Rp. 1.000.000,- dengan 2 kegiatan.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan dana Rp. 405.271.864,- dengan 2 kegiatan.
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan dana sebesar Rp. 255.054.511,- dengan 3 kegiatan
5. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan dana sebesar Rp. 1.000.000,- dengan 1 kegiatan
6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan dana Rp. 556.211.000,- dengan 3 kegiatan
7. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan dana sebesar Rp. 19.000.000,- dengan 1 kegiatan
8. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan dana sebesar Rp. 127.000.000,- dengan 2 kegiatan

--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja penting dalam menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan/stakeholder.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan dan Pangan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh instansi terkait, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Sumatera Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD

--	--

Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Solok dan Renstra Dinas).

Rencana Kerja ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2026, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Serta dapat memberikan pedoman dan arahan bagi stakeholder pembangunan perikanan dan pangan untuk lebih mudah berperan aktif dalam pembangunan.

Lebih dari itu dengan adanya Renja akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik. Sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Perikanan dan Pangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan visi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok.

Perwujudan visi dan misi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Koto Baru, September 2025
**Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Solok**

Ir. SYOUFITRI, MM
NIP. 19701115 200502 2 002

--	--